



newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 105, April 2018



Jelang Pesta Demokrasi, Pengkajian Gelar FGD Bahas Aktualisasi Peran Partai Politik (hal. 4)

2. Refleksikan Kesadaran Nilai-Nilai Berbangsa Lewat Dialog Wawasan Kebangsaan
3. Gubernur Lemhannas Buka Kegiatan *Training of Trainers* di Palembang
4. Jelang Pesta Demokrasi, Pengkajian Gelar FGD Bahas Aktualisasi Peran Partai Politik
5. Agus Widjojo Lantik Anggota Alumni Daniel K. Inouye APCSS
5. Gubernur Beri Arahan Terkait Penulisan Kertas Karya Ilmiah
6. KADIN Konsisten Jalin Kerja Sama dengan Lemhannas RI
7. Ikatan Alumni Habibie Lakukan Audiensi dengan Lemhannas RI
8. Tantangan Ketahanan Nasional Jelang Pilkada 2018 jadi Tema Forkom Lemhannas 2018
9. Revolusi Mental Bentuk Karakter Kepemimpinan Peserta PPRRA LVIII
10. Prof. Mie Oba Kunjungi Lemhannas, Diskusikan Konsepsi Indo Pasifik versi Jepang
11. Latih Kepemimpinan di Alam Terbuka, Peserta PPRRA LVII Ikuti Kegiatan Outbound
11. Berbagai kalangan di Ternate Ikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI

Refleksikan Kesadaran Nilai- Nilai Berbangsa lewat Dialog Wawasan Kebangsaan



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bersama Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Hubungan Internasional Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Tenaga Pengkaji Bidang Sistem Manajemen Nasional Lemhannas RI Laksda TNI Yuhastihar, M.M., dan Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A menjadi pembicara pada kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan yang bertema “Memperkuat Keutuhan NKRI dari Sudut Pandang Perkembangan Lingkungan Strategis, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional”, bertempat di Ruang Dwiwarna Purwa Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Kamis (1/3). Kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan ini dimoderatori oleh Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H.

Dialog Wawasan Kebangsaan dilaksanakan sebagai bentuk upaya memperkuat wawasan kebangsaan para peserta yang memiliki latar belakang profesi yang beragam agar dapat memahami pentingnya makna nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa. “Saya ingin mengajak untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai momentum perenungan dan introspeksi diri terhadap kualitas wawasan kebangsaan guna merefleksikan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai luhur yang telah kita miliki,” ujar Agus Widjojo dalam sambutannya.

Dialog wawasan kebangsaan kali ini diikuti oleh 200 orang peserta yang terdiri dari para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan anggota ormas.

Dengan mengusung tema “Ketahanan Ideologi Pancasila dalam Dinamika Ideologi Global”, acara dialog wawasan kebangsaan dibuka oleh Agus Widjojo dengan pengenalan lembaga seperti sejarah, tugas dan fungsi serta sosialisasi *core* Lemhannas RI yang terdiri dari wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional.

Narasumber Robert Mangindaan atau yang akrab disapa Bob Mangindaan ini mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam kondisi *fragmented* atau terpotong-potong. “Indonesia sedang dalam kondisi *fragmented*. Kebijakan ekonomi, pertahanan, undang-undangnya *fragmented*. Oleh karena itu, terdapat tiga virus yang sudah masuk dari *proxy*,” ujar Robert Mangindaan. Tiga virus yang dimaksud oleh Robert Mangindaan adalah masyarakat yang cenderung untuk berbohong, kemudian sering berbuat semi-realitas (realitas tiruan yang tidak lagi mengacu pada realitas sesungguhnya), dan bersifat rakus. Menurutnya, langkah konkret yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memulai perubahan dari diri sendiri serta penegakan hukum secara tegas.

Sedangkan Yuhastihar berpendapat bahwa tantangan terberat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia menjelang penyelenggaraan Pemilu 2018-2019 mendatang, yakni membangun kesadaran politik masyarakat. “Bagaimana menyadarkan masyarakat kita supaya tidak mudah dirayu dengan *money politic*. Untuk itulah kita harus membangun kesadaran politik kita harus memiliki mimpi yang sama tentang bangsa,” ujar Yuhastihar.●

Gubernur Lemhannas Buka Kegiatan *Training of Trainers* di Palembang

Kegiatan *Training of Trainers* Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Para Dosen, Guru, dan Widyaiswara di Provinsi Sumatra Selatan secara resmi dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Selasa (6/2), di Hotel Novotel Palembang. Secara simbolis pembukaan ini ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Gubernur Lemhannas RI kepada perwakilan peserta.

Dalam sambutannya, Agus Widjojo menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan model pelatihan untuk menciptakan pengajar-pengajar berwawasan kebangsaan yang memiliki semangat dan kompetensi, sehingga para pengajar dalam menyalurkan ilmu memiliki pemahaman yang kuat dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan yang dapat ditularkan kepada peserta didiknya.

"*Training of Trainers* Nilai-Nilai Kebangsaan ini diharapkan akan membantu para dosen, guru, dan widyaiswara pada lembaga Diklat untuk mewujudkan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkarakter kebangsaan secara lebih efektif, inovatif, dan kreatif sehingga dapat menyentuh rasa kebangsaan setiap peserta didik," lanjut Agus Widjojo di hadapan para peserta *training*.

Training yang menjadi program kerja Kedeputusan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI

ini bukan hanya berupa kegiatan pemberian materi pembelajaran tentang nilai-nilai dan wawasan kebangsaan tetapi juga membekali peserta untuk menjadi fasilitator yang handal sembari menyelami potensi terpendam, melatih membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan kewaspadaan.

Metode dalam *training* ini menggunakan model quantum, model pendidikan untuk orang dewasa yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan dikemas sesuai dengan kebutuhan para pengajar.

Kegiatan yang akan diselenggarakan selama 10 hari hingga tanggal 16 Maret 2018 ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dari kalangan dosen, guru, widyaiswara, TNI/Polri, dan media (RRI). Turut hadir dalam kegiatan pembukaan *Training of Trainers* Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Para Dosen, Guru, dan Widyaiswara di Palembang yaitu Asisten Bidang Administrasi dan Umum Pemprov Sumatra Selatan Prof. Dr. Edwar Juliartha yang mewakili Gubernur Sumatra Selatan, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Dr. Marga Taufiq yang mewakili Pangdam Sriwijaya, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Drs. Bimo Anggoro Seno, M.H. mewakili Kapolda Sumsel, Ketua MUI Provinsi Sumsel Prof. Dr. Aflatun Muchtar, M.A., dan perwakilan Kesbangpol Provinsi Sumsel.●

"Training of Trainers ini merupakan model pelatihan untuk menciptakan pengajar-pengajar berwawasan kebangsaan yang memiliki semangat dan kompetensi."
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo



Jelang Pesta Demokrasi, Deputi Pengkajian Gelar FGD Bahas Aktualisasi Peran Partai Politik

Menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada dan Pilpres tahun 2018-2019 mendatang, partai politik mulai beramai-ramai mencalonkan kandidat calon pemimpin baik di tingkat kepala daerah, anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), serta Presiden. Partai politik (parpol) menjadi salah satu pilar demokrasi yang sangat penting dalam mencetak kader pemimpin karena UUD NRI tahun 1945 pasal 6 A ayat 2 menyatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum melaksanakan pemilu" sementara itu pada pasal 22 E ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi bahwa "Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik".

Mencermati dinamika yang terjadi di tengah masyarakat dalam menyambut Pilkada dan Pilpres 2018-2019 mendatang, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI mengadakan suatu kajian melalui *Focus Group Discussion* (FGD) pada Selasa (6/3/2018) di Ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra, Lemhannas RI dengan mengangkat tema besar "Aktualisasi Kepemimpinan Negerawan di Lingkungan Kader Partai Politik guna Terwujudnya Etika Politik dalam rangka Ketahanan Nasional". FGD tersebut menghadirkan empat orang narasumber diantaranya Hendro

Witjaksono, Ak., M.Acc. Staf Kemen PAN RB RI, H. Zainudin Amali, S.E., M.Si Ketua Komisi II DPR RI, Prof. Dr. Hamdi Moeloek, M.Si Pakar Psikologi UI, dan Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni M.Agr. Prof. Dr. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr. Deputi Pengkajian Strategik membuka kegiatan dengan memaparkan beberapa permasalahan yang dibahas di dalam FGD.

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam FGD adalah adanya kepentingan kelompok/individu yang lebih mendominasi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat yang ditandai dengan banyaknya kepala daerah hasil pemilu yang tertangkap OTT (Operasi tangkap tangan) oleh KPK. "Sepanjang tahun 2018 ini, setidaknya ada 5

kepala daerah yang terjaring OTT tindak pidana korupsi. Sementara itu kondisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan pembangunan masih rendah. Artinya bahwa para pemimpin belum memiliki ciri-ciri kepemimpinan negarawan," ujar Djagal Wiseso Marseno.

Sementara itu Zainudin Amali mengungkapkan bahwa saat ini fungsi parpol sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin belum berjalan sebagaimana mestinya dan jika terus berlanjut, kondisi tersebut akan berdampak pada ketahanan nasional. "Karena partai politik belum mengedepankan kehadiran kader yang utama, tetapi lebih pada kehadiran massa. Bukan pada seberapa orang yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan parpol kedepannya," ujar Zainudin Amali Ketua Komisi II DPR RI. Menurut Zainudin, pemerintah perlu mencari format demokrasi yang lebih baik dan cocok di Indonesia, serta mampu menjawab kaidah-kaidah demokrasi secara universal.

Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan secara lebih mendalam dengan empat orang pembahas yakni Ubedilah Badrun Dosen Fisip UNJ, M.Si., Ari Nurcahyo, S.Si., M.Hum. Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang Taprof Bidang Kepemimpinan Lemhannas RI, dan Kisnu Haryo S.H., M.A. Taprof Bidang Politik Dalam Negeri Lemhannas RI. ●

"Fungsi parpol sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin belum berjalan sebagaimana mestinya dan jika terus berlanjut, kondisi tersebut akan berdampak pada ketahanan nasional."

***Ketua Komisi II DPR RI
H. Zainudin Amali, S.E., M.Si.***





Agus Widjojo Lantik Anggota Alumni Daniel K. Inouye APCSS

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik 9 orang pengurus Indonesian Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS) Alumni Association, Rabu (7/3) di Ruang Syailendra Gedung Astagatra Lemhannas RI. Lembaga yang didirikan pada tahun 1995 di Hawaii ini merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DKI APCSS bertujuan untuk mengajak perwakilan dari negara-negara Asia Pasifik untuk duduk bersama mendiskusikan perdamaian dan mempertahankan stabilitas keamanan dan kemakmuran di wilayah Asia Pasifik.

DKI APCSS memiliki misi menghubungkan dan memberdayakan praktisi keamanan untuk membangun pemahaman dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan area yang menjadi fokus APCSS, yakni seputar

manajemen krisis, perlawanan terhadap terorisme, keamanan maritim, pembangunan sektor keamanan, dan perdamaian.

Saat ini, DKI ACPSS telah memiliki kurang lebih 11.000 alumni dan 330 di antaranya berasal dari Indonesia. Dalam sambutannya, Agus Widjojo mengungkapkan bahwa para alumni nantinya yang akan memperkuat pemikiran dalam konteks tantangan Indonesia dalam lingkup Asia Pasifik, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. "Saya berharap para alumni DKI APCSS dapat memberikan kontribusi positif dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam konteks posisi Indonesia di kawasan Asia Pasifik, demi mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh," ujar Agus Widjojo. ●

Gubernur Beri Arahan Terkait Penulisan Kertas Karya Ilmiah

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan pengarahan awal terkait penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan yang semula disebut dengan Kertas Karya Perseorangan (Taskap) kepada para Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional, Jumat (16/3) pagi di ruang Pancasila, Gedung Trigatra Lemhannas RI. Menurut Agus Widjojo, perubahan yang terdapat pada Kertas karya Ilmiah Perseorangan adalah lebih diutamakan substansi daripada format penulisan kertas karya ilmiah Perseorangan tersebut.

Perubahan yang dilakukan pada Kertas Karya Ilmiah Perseorangan adalah lebih berdasar pada keilmuan/ ilmu pengetahuan. Di dalam sebuah karya ilmiah, terdapat fakta objektif yang menjadi latar belakang masalah. Selain itu, karya ilmiah berisi pandangan yang didukung melalui pembuktian berdasarkan hipotesis, serta mengandung kebenaran faktual. Dalam penyusunannya pula, karya ilmiah dilakukan secara sistematis, konseptual dan prosedural menggunakan metode tertentu.

Agus Widjojo kemudian menjelaskan bahwa proses yang harus dijalani pada saat menyusun karya ilmiah yakni diawali dengan melakukan identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data-data faktual, lalu analisis data yang terdiri dari analisis logis dan proses sebab akibat serta ditutup dengan kesimpulan dan saran.

Agus Widjojo juga mengungkapkan bahwa para peserta pendidikan PPR/PPS di Lemhannas RI dalam penyusunan karya ilmiah nantinya perlu melakukan kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya duplikatif (pengulangan) dalam membuat topik. Selain itu, kajian kepustakaan juga diperlukan agar penelitian yang dilakukan memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. ●



KADIN Konsisten Jalin Kerja Sama dengan Lemhannas RI



“Organisasi KADIN untuk dapat membantu memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan di ruang lingkup dunia usaha.”

*Ketua KADIN Indonesia
Rosan Perkasa Roeslani*

Kamar Dagang dan Industri Indonesia, atau disingkat KADIN Indonesia, yakni organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian selalu berusaha konsisten dalam menjalin kerja sama yang baik dengan Lemhannas RI. Sebagai salah satu bentuk kerja sama, KADIN setiap tahunnya mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) dan hingga saat ini sudah ada empat angkatan KADIN yang mengikuti Taplai. Baru-baru ini, KADIN melakukan audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo untuk meningkatkan kerja sama di antara kedua pihak pada Selasa (13/3) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Dalam pertemuannya kali ini, Ketua KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa banyak dari anggotanya yang

ingin dapat mengikuti Taplai di Lemhannas RI. “Animo masih cukup besar, menginginkan untuk bisa mengikuti kursus semacam itu. Kita juga terus mendorong kawan kawan KADIN ini ikut dalam PPR dan PPS. Terutama dari KADIN daerah yang ingin sekali mengikuti program dari Lemhannas supaya wawasan kebangsaan mereka lebih baik dan lebih besar,” ujar Rosan.

Agus Widjojo menyambut baik kerja sama yang ditawarkan oleh KADIN untuk terus mengirimkan anggotanya mengikuti pendidikan/ pelatihan di Lemhannas RI. “Kami senang sekali untuk bisa membina MoU dengan KADIN, bahkan kalau bisa mengikuti kursus reguler yang tujuh bulan untuk eselon dua. Kami mendapat amanat dari DPR, sedikit lebih banyak dari kalangan non TNI Polri, 49-51, amanatnya 51. Tapi kami kesulitan untuk mendapat masukan dari teman teman non TNI / Polri karena kebanyakan mereka kesulitan dengan waktu yang lama. Tetapi kalau yang Taplai ini bisa *custom tailored*,” ujar Agus Widjojo.

Rosan mengungkapkan bahwa awal mula terjalinya kerja sama

antara KADIN dengan Lemhannas RI pada saat masa kepemimpinan Gubernur Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. yang meminta organisasi KADIN untuk dapat membantu memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan di ruang lingkup dunia usaha. “Sudah ada 4 angkatan KADIN mengikuti Taplai, dimulai sejak masa kepemimpinan Gubernur Budi, beliau meminta KADIN untuk membantu memasyarakatkan masalah pamantapan ini di dunia usaha, dan waktu itulah kita mulai, dan selalu diadakan di Lemhannas,” Jelas Rosan.

Di akhir pertemuannya bersama Ketua Umum KADIN, Agus Widjojo meminta masukan terkait bentuk konkret lain selain keikutsertaan anggota KADIN dalam Taplai Lemhannas RI. “Coba saya diberi masukan bentuk-bentuk konkret MoU apa lagi selain dari Taplai, misalnya yang bisa memanfaatkan kompetensi inti dan bisnis inti dari KADIN yang mungkin bisa ditularkan dan bisa dimanfaatkan bersama,” kata Agus Widjojo. ●



Ikatan Alumni Habibie Lakukan Audiensi dengan Lemhannas RI

Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) melakukan kunjungan untuk melakukan audiensi dengan Lemhannas RI pada Rabu (13/3) di ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI. Dalam kesempatan tersebut, Bimo Sasongko selaku Ketua IABIE beserta jajarannya disambut langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Purn Agus Widjojo.

Pada mulanya, jelas Bimo, Program Habibie yang dimulai sejak tahun 1980-an hingga tahun 2000 ini digagas oleh B.J. Habibie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Program Habibie ini telah mengirimkan kurang lebih 4000 lulusan siswa menengah atas untuk melanjutkan jenjang pendidikan dengan beasiswa ke 9 negara maju dunia seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Perancis, Inggris, Austria, Belanda, Jepang dan Australia.

Bimo berpendapat bahwa beasiswa ini merupakan beasiswa yang sukses. "Ini adalah salah satu program beasiswa paling sukses, menurut kami, dan saya pikir benar karena beliau (B.J. Habibie) sudah mem-*prepare* SDM unggul kita di bidang science dan teknologi," ujar Bimo Sasongko. Selain itu, para siswa yang dikirim melalui program beasiswa Program Habibie ini saat ini diharapkan akan memimpin atau menempati posisi strategis di industri strategis.

Bimo Sasongko dalam audiensi tersebut juga menjelaskan bahwa IABIE adalah organisasi ikatan alumni program beasiswa yang didirikan pada tahun 2012 lalu. Ikatan alumni dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi para alumni Program Habibie yang saat ini hampir 90 persen alumninya telah kembali ke tanah air.

Lebih lanjut, Bimo Sasongko menuturkan bahwa tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memberikan

kontribusi nyata kepada tanah air dengan bekerja sama dengan Lemhannas RI. "Kita siap untuk berkarya karena kita dikirim (ke luar negeri) adalah untuk membangun bangsa Indonesia," jelas Bimo Sasongko.

Agus Widjojo menanggapi positif hal tersebut sembari menjelaskan mengenai Lemhannas. Agus Widjojo mengatakan bahwa Lemhannas adalah Lembaga Ketahanan, bukan Pertahanan. Lemhannas memiliki *core bussiness* meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan doktrin operasionalnya adalah wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Agus Widjojo juga menyebutkan bahwa Lemhannas memiliki fungsi Pendidikan untuk calon pimpinan tingkat nasional, melakukan kajian tingkat strategis, dan melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. *Courtesy Call* tersebut dilanjutkan dengan diskusi ringan mengenai keadaan Indonesia saat ini dan ditutup dengan foto bersama.●

“**Kita siap untuk berkarya karena kita dikirim (ke luar negeri) adalah untuk membangun bangsa Indonesia,**”

Ketua Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) Bimo Sasongko



“
Demokrasi harus cerdas wawasan kebangsaan. Bagaimana tugas partai politik dalam membangun demokrasi untuk membangun keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa,”
Ketua Forum Pimpinan Redaksi Suryopratomo

Tantangan Ketahanan Nasional Jelang Pilkada 2018 jadi Tema Forkom Lemhannas 2018

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Forum Komunikasi (Forkom) yang diselenggarakan oleh Biro Humas Lemhannas RI dengan mengundang para pemimpin redaksi beserta jurnalis media cetak, elektronik, dan online, Rabu (14/3) di Anjungan Trigatra Lemhannas RI. Forkom yang telah diselenggarakan sejak tahun 2011 ini bertujuan untuk saling berbagi informasi yang faktual dan aktual tentang isu ketahanan nasional sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara Lemhannas RI dengan media massa.

Tantangan ketahanan nasional menjelang Pilkada serentak di tahun 2018 menjadi tema menarik yang diangkat dalam forkom kali ini. Menurut Agus Widjojo, Pemilu yang semakin dekat ternyata belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik untuk mengkonsolidasikan internalnya. “Mereka menganggap itu sudah cukup, *business as usual*. Mereka baru sadar tidak ada kader yang bisa ditampilkan atau kadernya yang korupsi atau persepsi yang partainya kuat ternyata kalah di daerah. Partai belum introspeksi mengapa mereka kalah,” jelas Agus Widjojo.

Agus Widjojo mengungkapkan bahwa ketahanan nasional dalam menghadapi Pilkada mendatang masih dalam proses, karena tidak ada basis ideologi yang menaungi partai politik sebagai pembeda di antara satu partai dengan partai lainnya. “Partai A tidak berkoneksi dengan partai B, tapi di tempat lain bisa berkoalisi dengan partai B yang basis ideologinya berseberangan, ini adalah keterbelakangan sistem politik, tapi bagi

ketahanan nasional ini membawa keuntungan dalam memoderasi konflik,” ujar Agus Widjojo.

Beberapa isu yang diangkat dalam diskusi forkom di antaranya mengenai maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK kepada beberapa calon kepala daerah juga menjadi salah satu indikator bahwa masih marak terjadi *money politic* di masyarakat karena besarnya dana bagi calon kepala daerah dalam berkampanye. Selain itu, isu-isu lain yang menjadi pemicu konflik seperti SARA masih menjadi ancaman bagi penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Lebih lanjut, maraknya penyebaran *hoax* di media sosial, serta masyarakat yang mudah termakan oleh *hoax*.

Ketua Forum Pemimpin Redaksi Suryopratomo alias Tommy menyoroti terkait sistem demokrasi di Indonesia yang menurutnya dibangun secara terburu-buru. Karena hal tersebut, peran partai politik sangat diperlukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. “Supaya bisa terkelola, demokrasi itu harus cerdas dan berwawasan kebangsaan. Bagaimana tugas partai politik dalam membangun demokrasi untuk membangun keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Suryopratomo. Menurutnya permasalahan bukan berada pada ketahanan nasional, tetapi pada syahwat politik yang menghalalkan segala cara di dalam pertarungan. “Poin saya, mari kita menyadari demokrasi itu harus diterapkan di alam yang nyata. Jangan demokrasi itu dibawa ke paradigma idealisme. Demokrasi bukan *best system*, demokrasi itu *second*,” jelas Suryopratomo. ●

Revolusi Mental Bentuk Karakter Kepemimpinan Peserta PPRA LVIII

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo secara resmi membuka Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII di ruang Dwiwarna Purwa, Gedung Pancagatra Lemhannas RI Senin (25/3). Sebanyak 100 orang peserta PPRA LVIII yang berasal dari TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Partai Politik, Legislatif, Kopertis, Pemerintah Provinsi, Ormas, dan peserta dari Negara Sahabat yakni Australia, Arab Saudi, Bangladesh, Fiji, Laos, dan Pakistan. Para peserta nantinya akan menjalani pendidikan selama tujuh bulan yang terdiri dari tahap *off-campus* dan *on-campus*.

Dalam sambutannya, Agus Widjojo menekankan kepada peserta agar mampu melakukan revolusi mental, transformasi sikap dan perilaku yang mencerminkan sosok kader pimpinan tingkat nasional. "Revolusi mental untuk membentuk karakter kepemimpinan yang kuat tidaklah diberikan dengan cara mengajarkan sifat-sifat mental yang baik, tetapi dengan mematuhi dan mengikuti

semua persyaratan yang diberikan lembaga," ujar Agus Widjojo.

Program pendidikan ini juga bertujuan untuk mempertajam dan meningkatkan kapasitas serta efektifitas kepemimpinan tingkat nasional para pimpinan, pada tingkat strategis dengan cara memformulasikan kebijakan nasional melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu Agus Widjojo juga berpesan kepada para peserta agar dalam menjalankan pendidikan di Lemhannas RI memiliki rencana perseorangan untuk dicapai. "Hasil yang dicapai para peserta harus lebih lengkap dalam memiliki pengetahuan dan kemampuan membuat analisis dan keputusan pada tingkat strategis sebagai seorang pemimpin selesai mengikuti pendidikan nantinya," jelas Agus Widjojo.

Menurut Agus Widjojo, kepemimpinan strategis tidaklah berpusat pada kompetisi, melainkan membutuhkan kemampuan untuk menyatukan perbedaan dalam bentuk kerjasama. "Ego dan *self-esteem* sudah cukup kita bangun dalam masa kompetisi di tingkat teknis dan

individu, kini saatnya peserta untuk mentransformasikan mindset dan fokus pada pengembangan kerja untuk mencapai tujuan bersama," jelas Agus Widjojo.

Selain kepada para peserta, Agus Widjojo juga menyampaikan pesan kepada penyelenggara pendidikan, baik tenaga pendidik, maupun unit kerja di Lemhannas RI untuk mempersiapkan terkait penyelenggaraan PPR secara baik tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memanfaatkan fasilitas yang ada dalam menunjang proses pendidikan.

Upacara pembukaan dihadiri pula oleh Mantan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S, Ketua Umum IKAL Jenderal TNI Agum Gumelar, M.Sc, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, Sestama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Arif Wachyunadi, Komandan Sesko TNI, Asisten Personel Panglima TNI, Sesjen Wantannas Irjen Pol Drs. Tjetjep Agus S, MM, MH, Wakil Ketua SKK Migas, Perwakilan Kemhan, Perwakilan Kemenkumham, dan Perwakilan Pangdam Jaya.●



“*Kepemimpinan strategis tidaklah berpusat pada kompetisi, melainkan membutuhkan kemampuan untuk menyatukan perbedaan dalam bentuk kerjasama.*”
Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (purn) Agus Widodojo

Prof. Mie Oba Kunjungi Lemhannas, Diskusikan Konsep Indo Pasifik versi Jepang

Profesor Mie Oba, akademisi dari Tokyo University of Science Jepang mengunjungi Lemhannas RI untuk berdiskusi tentang politik luar negeri (polugri) Jepang terutama tentang konsepsi Indo Pasifik sebagai strategi regional Jepang, pada Rabu (21/3) di Ruang Airlangga, gedung Astagatra lantai 3 Lemhannas RI. Promosi Jepang tentang konsepsi kawasan Indo Pasifik yang bebas dan terbuka telah digaungkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe tahun 2007 silam di hadapan parlemen India, yang menyebutkan sebagai pertemuan dua lautan, Samudra Pasifik dan Samudra India.

Menurut Mie Oba, konsepsi ini merupakan proposal strategi Jepang untuk meluaskan perdamaian dan kemakmuran regional yang sebelumnya berorientasi di kawasan Asia Timur-Asia Pasifik, kini meluas ke wilayah Samudra India termasuk di dalamnya negara-negara di Afrika, seperti yang disebutkan PM Abe dalam dalam forum Tokyo International Conference of Africa's Development (TICAD) Agustus 2016.

"Menteri Luar Negeri (Fumio) Kishida pada awal tahun 2015 dalam pidatonya di New Delhi, India menyebutkan 3 jembatan yang menghubungkan Indo Pacific; nilai dan spirit, ekonomi yang dinamis, lautan terbuka dan stabil", jelas Oba.

Oba melanjutkan, strategi ini untuk meluaskan hubungan strategis di antara negara besar dan kekuatan regional yang disebut *quadrilateral strategic linkage*. "Jepang, Amerika Serikat, India, dan Australia merupakan negara yang penting, tetapi kadang konsepsi Indo Pasifik ini menyiratkan sebuah kemungkinan koalisi anti Tiongkok," ungkap Oba.

Implikasi ini, tambah Oba, menimbulkan reaksi dari ASEAN. Menurutnya, pemerintah Jepang menawarkan

alternatif kerangka arsitektur keamanan yang ditawarkan China dalam *Belt and Road Initiative* (BRI).

Konsepsi Indo Pasifik sendiri cukup populer akhir-akhir ini. Presiden Joko Widodo juga memperkenalkan konsep Indo-Pasifik pada KTT ASEAN-India Januari silam, yang tentu berbeda dengan konsepsi Indo Pasifik versi Jepang. Konsep Indo-Pasifik versi Indonesia mengajak semua "*key players*", termasuk Tiongkok dan Rusia, dengan mengedepankan *habit of dialogue* tanpa ada satupun negara yang merasa tertinggal.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, sejumlah tenaga pengkaji, tenaga pengajar, tenaga profesional, pejabat struktural, dan perwakilan Peserta PPRALVII ini, dibahas pula tentang hubungan Indonesia-Tiongkok, isu Laut China Selatan, nuklir Korea Utara, aliansi Jepang-Amerika Serikat, dan politik luar negeri Jepang di negara-negara Asia Selatan.

Sebelum pelaksanaan diskusi, Profesor Mie Oba melaksanakan *courtesy call* dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra lantai I.●

"Jepang, Amerika Serikat, India, dan Australia merupakan negara yang penting, tetapi kadang konsepsi Indo Pasifik ini menyiratkan sebuah kemungkinan koalisi anti China,"

Akademisi Tokyo University of Science Prof. Mie Oba



Latih Kepemimpinan di Alam Terbuka, Peserta PPRA LVII Ikuti Kegiatan Outbound

melatih rasa saling percaya, saling memperhatikan serta sikap proaktif dan komunikatif antar tim.

Mayjen TNI Karsiyanto dalam sambutannya menyampaikan "Hal tersebut (outbound) harus dijalani, agar para peserta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, menerapkan rasa kepedulian, mengutamakan kebersamaan, memperkuat soliditas dan merasa senang sepenanggung. Dengan demikian, pengalaman yang didapat dalam kegiatan outbound tersebut

akan mampu membantu peserta dalam proses pembelajaran selama menempuh program pendidikan di Lemhannas RI."

Outbound yang diselenggarakan selama tiga hari yakni pada 27 - 29 Maret 2018 di Lido Resort, Sukabumi, diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari 38 orang anggota TNI (AD, AL, dan AU), 20 orang anggota Polri, 20 orang dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK), 1 orang dari Kejaksaan Agung, 2 orang anggota Legislatif, 11 orang anggota Organisasi Masyarakat, dan 2 orang dari Partai Politik.●

Peserta PPRA LVII mengikuti pembukaan outbound di Lapangan Lemhannas RI, Selasa (27/3). Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto bertindak sebagai pembina upacara dalam Pembukaan outbound Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII.

Outbound merupakan salah satu program kegiatan penting yang harus ditempuh oleh para peserta program pendidikan. Kegiatan outbound ini dilakukan sebagai bentuk pelatihan perilaku kepemimpinan dan manajemen di alam terbuka, dengan

Berbagai kalangan di Ternate Ikuti Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI

Sebanyak 100 peserta dari kalangan birokrat, akademisi, DPRD, tokoh masyarakat, dan elemen TNI-Polri dari Ternate, Provinsi Maluku Utara mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI. Acara yang bertajuk "Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI dan Polri di Ternate" ini dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Hotel Grand Dafam Bela Ternate, Maluku Utara pada Selasa (20/03).

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyatakan rasa terima kasihnya kepada para peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini dan menyampaikan harapannya agar peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk menggali makna dan pemahaman wawasan nusantara dan nilai-nilai kebangsaan.

"Sebagai bangsa yang disatukan karena perbedaan dan kemajemukan, nilai-nilai dan wawasan kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus senantiasa dijaga. Melihat kondisi SDM yang cukup besar

secara kuantitas, tetapi masih belum memenuhi harapan dari segi kualitas. Mentalitas dan moralitas, termasuk di dalamnya etos kerja, nasionalisme, dan patriotisme perlu untuk ditanamkan dan ditumbuhkembangkan", ujar Agus Widjojo dalam sambutannya.

Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan ini sendiri akan diselenggarakan selama delapan hari, dari 20 Maret hingga 27 Maret 2018. Selesai mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa, memahami paradigma nasional yaitu wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan kepemimpinan nasional, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing di masyarakat.

Selama delapan hari peserta akan mendapatkan berbagai materi nilai dan wawasan kebangsaan, diskusi kelompok, simulasi, dan outbound untuk penyegaran.

Pembukaan kegiatan pemantapan kebangsaan di

Ternate dihadiri pula oleh Sultan Tidore Husain Sjah, Plt. Gubernur Maluku Utara Zeth Sahuburua, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Kornel Sianturi, perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Sekretaris DPRD Maluku Utara Abubakar Abdullah.●

"Kondisi SDM yang cukup besar secara kuantitas, tetapi masih belum memenuhi harapan dari segi kualitas. Mentalitas dan moralitas, termasuk di dalamnya etos kerja, nasionalisme, dan patriotisme perlu untuk ditanamkan dan ditumbuhkembangkan."

Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (purn) Agus Widjojo





Tim **Redaksi** newsletter Lemhannas RI

Pengarah: **Arif Wachyunadi** Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi: **Mindarto**

Redaktur Pelaksana: **Wahyu Widji Pamungkas** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Staf Redaksi: **Ni Made Vira Saraswati, Endah Heliana, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Andriansyah** Fotografer: **Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto**

Sekretariat: **Linda Purnamasari, Gatot, Ayu Novitasari** Alamat Redaksi: **Biro Humas Settama Lemhannas RI,**
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110 Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <http://www.lemhannas.go.id>